

## Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Desa

### *Risk Management of The Village Financial Management*

Asbeni<sup>1</sup> dan Sunardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Sambas/Program Studi Teknik Multimedia Jurusan Manajemen Informatika

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Sambas/Program Studi Agribisnis Jurusan Agribisnis

\*E-mail : benifaturahman@gmail.com

#### ABSTRACT

*The increase in funds received by each village all devices of the village should be ready and able to manage those funds with transparent and accountable in order to avoid legal issues. Therefore, it is very important the presumably conducted research on the risk management of the financial management of the village. As for the goal of the research is to identify, measure and strategy of financial management of the village. This research is a case study in the village Bay and the village of Sekura Swell Sub Sacred Bay with respondents Councilor. Data required primary data is sourced from an interview through the questionnaire and FGD and secondary data obtained from the study of librarianship. The analysis of the data used is with the SWOT and QSPM. Data processing is carried out with the help of Microsoft Excel. Internal identification results are: 1)the already high level of education; 2)Regulation of the 56th Government village is getting better; 3)coordination with subordinate and BPD is already good; 4 the performance of the device has not been fullest village; 5)device capabilities are categorized as low; f) knowledge of the Administration is still low; 6)still focuses on infrastructure development; 7)haven't been able to capitalize on SDA; 8)internal control systems are still weak. While the Eksternalnya factors are: 1)the magnitude of the ADD-ON brings; 2)progress of information technology; 3)oversight by BPD is getting better; 4)Regulation of financial governance of the village is already good; 5)lack of transparency; 6)the uncertain political conditions; 7)less supervision of society; 8)there are still proposals are a desire, not a necessity; 9)understanding of the public about the legislation in force; 10)quality development results are not yet in compliance with the planning. The average level of risk: risk of planning (with a value of 4.4); the risk of implementation (4.8); the risk of administering, reporting, and accountability (4.2); and risk oversight (4.3). Financial management strategies and their importance, namely: 1)increased understanding of the planning and supervision on the activities in the village; 2)strengthening regulation on management and governance by making use of information technology; 3)improve the quality of planning, implementation, and monitoring; 4)increased the capacity and capabilities of the device with the science and technology advances to financial management, the utilization of SDA and the making of the regulation; 5)enhance coordination to provide an understanding of the legislation and transparency*

**Keywords:** *finance, financial management, risk management*

**Disubmit :** 18-7-20187; **Diterima :** 08-9-2018, **Disetujui :** 04-10-2018

#### PENDAHULUAN

Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini desa sedikit terlupakan dari pembangunan, karena banyak pembangunan terfokus di perkotaan. Sangat tidak heran apabila banyak penduduk desa yang seharusnya menjadi bagian dari perubahan di desa pergi mencari pekerjaan ke kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, perkembangan dan kemajuan desa menjadi lambat, bahkan ada diantara desa yang

cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya menjadi penyebab dari berbagai masalah di kota-kota tujuan tersebut, mulai dari kemacetan, tata kota yang tidak teratur, penambahan penduduk, sampai pada tingkat kriminalitas yang menjadi sangat tinggi. Sehingga menyebabkan kesenjangan dan perbedaan pertumbuhan ekonomi antara di desa dan di kota menjadi sangat tinggi. Hal inilah yang dijadikan alasan banyaknya penduduk desa mencari pekerjaan ke kota. Selain itu, apabila tetap bekerja di desa dianggap tidak bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Agar di desa mengalami percepatan pembangunan, maka mulai tahun 2015, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana yang diperuntukan untuk desa secara nasional berjumlah 9,01 triliun rupiah. Walaupun sebagian masyarakat menganggap dan mengatakan hal ini sebagai sebuah kebijakan yang bersifat politis. Karena pada periode pemerintahan sebelumnya, pada dasarnya sudah ada berbagai program dari masyarakat yang berbasis desa seperti Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Tapi ditingkat pelaksanaannya ada beberapa masalah yang muncul. Dengan munculnya PNPM mandiri dengan masyarakat sebagai perancang kegiatan pembangunan untuk memecahkan permasalahan mereka sendiri dianggap belum terlalu efektif dalam menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, para elite lokal di desa seringkali masih mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dengan dicairkannya dana desa pada tahun 2015 ini siap atau tidak siap semua perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Karena merupakan program yang baru, perangkat desa harus mempelajari cara menyusun semua agenda kegiatan pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang diperlukan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda kegiatan tersebut. Selain itu, mau tidak mau dan suka tidak suka, perangkat desa di seluruh Indonesia, khususnya di desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Maka tidak heran, banyak kalangan beranggapan bahwa akan banyak kepala desa dan perangkatnya masuk penjara jika tidak hati-hati dalam menggunakan dan mengelolanya agar dana desa jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan arah pembangunan berbasis pedesaan. Oleh karena itu, sangat penting kiranya dilakukan suatu penelitian mengenai manajemen risiko tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa?; 2. Bagaimana tingkat resiko-resiko yang akan terjadi dalam pengelolaan keuangan desa?; 3. Bagaimanakah bentuk strategi yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi resiko-resiko dalam pengelolaan keuangan desa?

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan ini dibatasi sebagai studi kasus pada pengelolaan keuangan desa di Desa Sekura dan desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, yaitu didasarkan pertimbangan bahwa 1) Kecamatan Teluk Keramat mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sambas yaitu sebanyak 24 desa, 2) Desa Sekura merupakan ibu kota Kecamatan Teluk Keramat dengan jumlah dusun terbanyak dari desa lainnya dan desa Teluk Kembang merupakan jumlah dusun paling sedikit. Oleh karena itu, desa sampel akan dijadikan pilot project dari kegiatan ini untuk desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Teluk Keramat khususnya dan kabupaten Sambas pada umumnya. Selain itu penelitian ini lebih bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Namun diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang risiko pengelolaan keuangan desa. Untuk analisis yang diperlukan adalah: 1) Data primer, merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan kuesioner, dan pengumpulan data dilakukan melalui : a) Wawancara langsung; Wawancara langsung

dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan semua perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, tokoh pemuda. b) Observasi; Teknik ini digunakan untuk melakukan pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap obyek kajian yang langsung diamati di lapangan guna melengkapi teknik wawancara. 2) Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan berupa literatur, dokumen, jurnal dan laporan penelitian, majalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui media internet.

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

#### **Analisis *Focus Group Discussion* (FGD)**

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan diskusi kelompok yang dilakukan secara sistematis dan terarah atas suatu isu atau masalah tertentu. FGD dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi tertentu. FGD merupakan salah satu bentuk riset dalam penelitian sosial dan pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu. Penyelenggara menentukan tujuan riset dan merumuskan tujuan tersebut ke dalam tahapan-tahapan FGD (Lingkaran Survei Indonesia, 2006).

Adapun ciri-ciri penting dari FGD adalah terfokus dan terarah. FGD dikatakan sebuah diskusi yang terfokus dan terarah karena: 1) Topik ataupun materi yang akan didiskusikan telah ditentukan oleh penyelenggara, dan 2) Peserta FGD sudah ditentukan ataupun diseleksi sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan target informasi yang ingin didapat dari sebuah FGD.

FGD memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1) berupa format diskusi, 2) peserta FGD berjumlah antara 6 – 12 orang, 3) panjang/lama diskusi yang dilakukan antara 1,5 – 2 jam per-sesi, 4) peserta diskusi sudah diseleksi atau ditentukan berdasarkan karakteristik atau ciri yang sama oleh penyelenggara sesuai dengan tujuan riset, 5) bentuk data berupa percakapan (termasuk intonasi atau mimik muka) dan gerak tubuh dan bahasa non verbal, 6) pengambilan data dapat dilakukan melalui rekaman diskusi baik audio maupun video serta transkrip hasil diskusi, 7) moderator menggunakan petunjuk pelaksanaan diskusi yang dilengkapi dengan topik-topik yang akan didiskusikan termasuk alokasi waktu dari masing-masing topik, 8) bentuk serta format laporan berupa deskripsi dan narasi dengan pengutipan pilihan komentar atau pendapat. Analisis ditujukan pada aspek yang banyak dibicarakan seperti argumentasi yang banyak muncul, dan sudut pandang yang banyak keluar dari peserta (Lingkaran Survei Indonesia, 2006).

FGD merupakan salah satu bentuk penelitian sosial. FGD dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi dan pengalaman individu. FGD tidak memiliki pretensi untuk melakukan generalisasi atau menggambarkan pendapat atau persepsi masyarakat secara akurat. Tujuan dari FGD adalah untuk pendalaman (*insight*) terhadap suatu isu, masalah atau topik tertentu. Peserta FGD yang diseleksi adalah homogen, yaitu peserta yang dipilih berdasarkan karakteristik dan latar belakang yang sama. Pengambilan data FGD bersifat sosial, artinya peserta FGD saling berinteraksi dalam menyampaikan, mendengarkan maupun dalam mendebat pendapat orang lain. Dalam penelitian ini dilakukan FGD terhadap semua perangkat desa yang terkait dengan manajemen resiko pengelolaan keuangan desa di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat. Peserta FGD melakukan diskusi mengenai beberapa topik untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengetahui pandangan terhadap resiko dalam pengelolaan keuangan. Wawancara dalam FGD dilakukan secara langsung dan dibantu dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Data yang telah diperoleh dalam kajian ini, baik primer maupun sekunder diolah secara deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, rataan skor, dan tabulasi silang. Kajian dilakukan dengan analisa SWOT yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan frekuensi terjadinya risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Alat analisis yang sederhana dan cukup baik, efektif dan efisien dalam memisahkan masalah-masalah utama yang dihadapi baik berupa faktor internal dan

eksternal. Ada beberapa tahapan dalam penyusunan dalam SWOT, seperti a) Lingkungan eksternal adalah segala kekuatan yang ada di luar organisasi, pengaruh organisasi tidak terlihat sama sekali. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal tersebut terdiri atas lingkungan umum. b) Lingkungan internal suatu organisasi adalah hasil analisis dari nilai atau identifikasi segala faktor yang memengaruhi kinerja organisasi. Kumpulan sumber daya, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi, sehingga mampu memanfaatkan peluang dengan cara efektif dan secara bersama mampu mengatasi ancaman.

Setelah melakukan analisis faktor internal dan eksternal organisasi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) yang kemudian diberikan rating. Penentuan rating oleh pakar atau manajemen di organisasi dilakukan terhadap perubahan hasil analisis dan memberikan peringkat dengan skala yang ditetapkan, misalnya 1, 2, 3, dan 4. Matriks IFE dan EFE selanjutnya diberi bobot dan dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor untuk menghasilkan skor. Dari skor yang diperoleh kemudian dapat diketahui posisi organisasi pada matriks Internal dan Eksternal (IE). Hal ini penting dilakukan, agar strategi yang diterapkan mampu mengembangkan usaha dengan baik.

Langkah selanjutnya melakukan analisis strategi dengan analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan-kelemahan (*Strengths-Weaknesses*) dan peluang-ancaman (*Opportunities-Threats*). Matriks SWOT akan menghasilkan empat tipe strategi yaitu: (a) strategi *Strengths-Opportunities*, (b) strategi *Strengths-Threats*, (c) strategi *Weaknesses-Opportunities* dan (d) strategi *Weaknesses-Threats*. Model matriks untuk menganalisis SWOT akan digambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dalam kebijakan pengembangan organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki internal organisasi, seperti yang dimuat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik SWOT

		<b>Internal</b>	
		<b>Strengths (S)</b> faktor-faktor kekuatan internal	<b>Weaknesses (W)</b> faktor-faktor kelemahan internal
<b>Eksternal</b>	<b>Opportunities (O)</b>	<b>Strategi SO</b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi WO</b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	<b>Threats (T)</b>	<b>Strategi ST</b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b>Strategi WT</b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berdasarkan dari tabel 1. Diketahui bahwa Strategi SO ini dilakukan untuk memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang dengan sebesar-besarnya. Strategi ST ini dilakukan untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi WO ini dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan Strategi WT ini kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta untuk menghindari ancaman.

Setelah semua data terangkum dalam matriks SWOT, selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu penggunaan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) (Tabel 2). QSPM digunakan untuk merumuskan strategi mana yang terbaik sebagai strategi alternatif, yang obyektif, berdasarkan faktor-faktor sukses internal dan eksternal yang telah dikenali sebelumnya (David, 2006).

Tabel 2. Matriks QSP

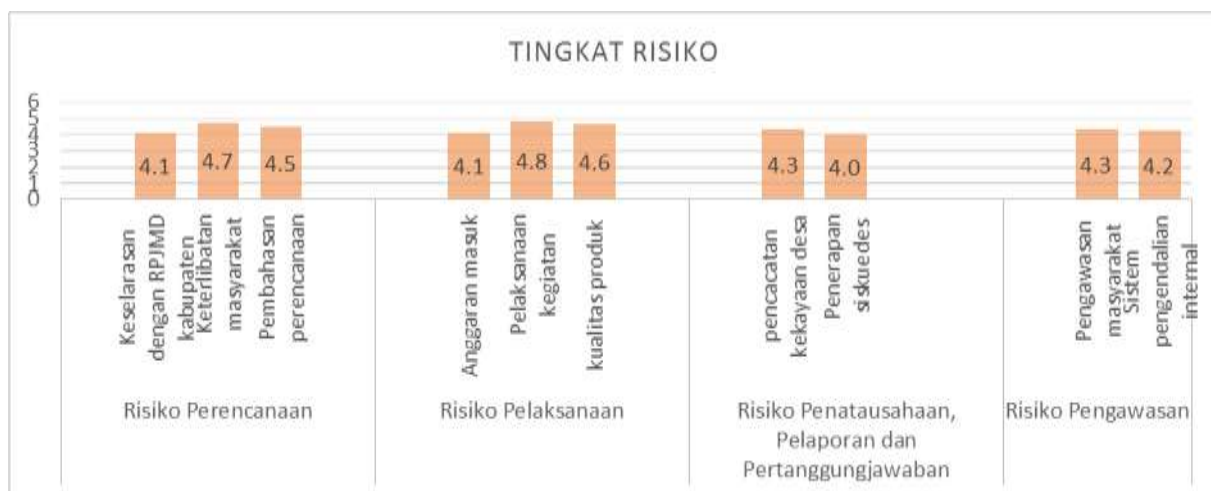
Faktor-faktor kunci	Bobot	Alternatif strategi			
		Strategi 1		Strategi 2	
		AS	TAS	AS	TAS
Faktor Internal					
Faktor Eksternal					
Jumlah total nilai daya tarik					

Keterangan : AS = nilai daya tarik, TAS = total nilai daya tarik, Nilai daya tarik: 1 = tidak menarik/mempengaruhi, 2 = agak mempengaruhi, 3 = cukup mempengaruhi, 4 = sangat mempengaruhi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Responden terhadap Risiko Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dikelola oleh desa. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Dengan begitu besarnya kemungkinan terjadinya risiko yang akan muncul dan minimnya instrument-instrumen pengendalian risiko. Maka langkah awal sangat perlu untuk dilakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan sejumlah responden, baik itu masyarakat umum dan perangkat desa di desa Sekura dan desa Teluk Kembang Kecamatan Telu Keramat Kabupaten Sambas teridentifikasi beberapa risiko seperti dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Hasil tabulasi dari berbagai risiko dapat dilihat pada Gambar 1. Rata-rata skor yang digunakan adalah skala 1-5 yaitu dari yang sangat penting (5) sampai tidak penting (1).

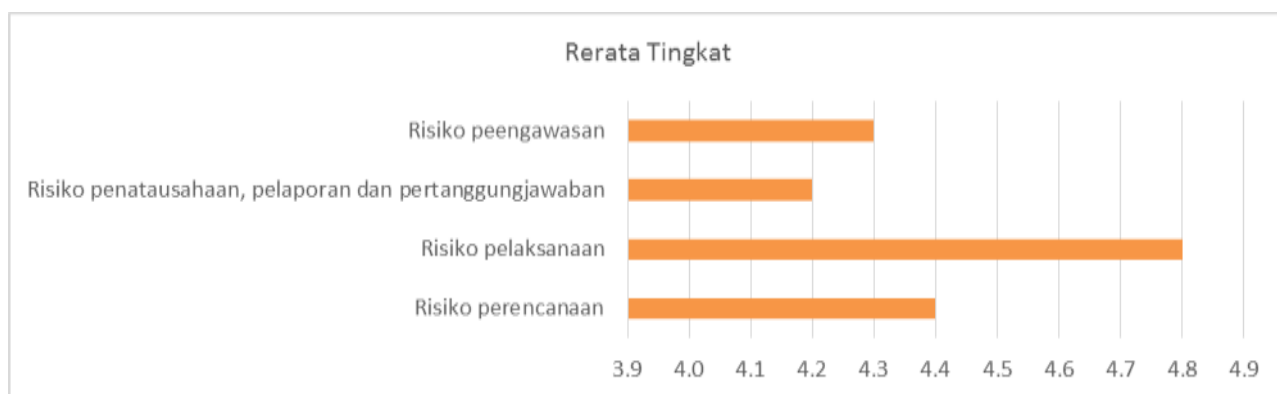


Gambar 1. Tingkat Risiko Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Gambar 1. menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan perangkat desa berdasarkan tingkat kepentingan dari berbagai risiko. Berdasarkan pendapat masyarakat dan perangkat desa yang menjadi responden, risiko perencanaan terdiri dari keselarsan dengan RPJMD kabupaten, keterlibatan masyarakat, dan pembahasan dalam perencanaan. Bila ditinjau dari risiko pelaksanaan terbagi menjadi anggaran masuk, pelaksanaan kegiatan, dan kualitas produk. Sedangkan dari risiko penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari pencacatan kekayaan desa, dan penerapan siskuedes. Serta dari risiko pengawasan terdiri dari pengawasan masyarakat, dan system pengendalian internal.

Adapun resiko yang paling sering dihadapi oleh desa Dari berbagai macam risiko tersebut, risiko dalam perencanaan yang paling besar pengaruhnya adalah keterlibatan masyarakat dalam hal pengambilan

keputusan, kemudian diikuti oleh pembahasan dalam perencanaan dan yang terakhir adalah keselarasan dengan RPJMD kabupaten yang kurang. Kemudian dari risiko pelaksanaan yang paling kuat pengaruhnya adalah keterlambatan anggaran masuk, yang diikuti oleh pelaksanaan kegiatan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan dari risiko penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban faktor yang paling besar pengaruhnya adalah pencacatan kekayaan desa, dan selanjutnya adalah tentang penerapan siskuedes. Serta faktor dari risiko pengawasan yang paling tinggi pengaruhnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih sangat minim, dan diikuti oleh system pengendalian internal yang masih minim.



Gambar 2. Persepsi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Kepentingan dari Berbagai Risiko

Gambar 2. menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat berdasarkan tingkat kepentingan dari berbagai risiko. Berdasarkan pendapat masyarakat responden di wilayah desa Sekura dan Teluk Kembang, risiko pelaksanaan merupakan risiko yang paling berpengaruh diikuti dengan risiko perencanaan, risiko pengawasan, serta risiko penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **Manajemen Risiko di Tingkat Desa**

Manajemen risiko di tingkat masyarakat di Desa Sekura dan Teluk Kembang lebih difokuskan kepada pengurangan risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan terutama pembangunan dibidang infrastruktur. Walaupun pada dasarnya cepat atau lambatnya anggaran masuk ke kas desa tidak bisa dikondisikan oleh perangkat desa sebagai kuasa pengguna anggaran, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi tolok ukur bagus atau tidaknya hasil akhir dari suatu produk yang dibuat. Olehkarenanya, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan, perangkat desa selalu memberikan masukan-masukan tentang efek-efek yang diakibatkan jika dalam pengerjaan kegiatan tidak maksimal akan berpengaruh pada ketahanan dan lamanya dalam penggunaan hasil oleh masyarakat. Manajemen risiko di tingkat desa lebih mengutamakan pada aspek sosial. Hal ini dikarenakan oleh kultur masyarakat yang ada di desa, apabila suatu pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi sosial yang menjadi sanksi yang akan didapatkan.

### **Analisis Faktor Lingkungan**

#### **Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sekura dan desa Teluk Kembang. Kekuatan yang teridentifikasi terdiri dari tingkat pendidikan perangkat desa sudah tinggi, regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik, koordinasi dengan bawahan dan BPD sudah baik. Faktor kelemahannya adalah kinerja perangkat desa belum maksimal, kapabilitas perangkat masih tergolong rendah, pengetahuan aparatur desa tentang administrasi yang masih rendah, masih berfokus pada

pembangunan infrastruktur, belum bisa memanfaatkan SDA yang ada di desa, sistem pengendalian internal masih lemah.

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman/tantangan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sekura dan desa Teluk Kembang. Faktor peluang yang teridentifikasi yaitu besarnya ADD yang didapatkan, kemajuan teknologi informasi, pengawasan yang dilakukan oleh BPD semakin baik, regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa sudah baik. Faktor yang menjadi tantangan dalam pengelolaan dana desa di desa adalah kurangnya transparansi, kondisi politik yang tidak menentu, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, masih ada usulan yang terdani bersifat keinginan bukan kebutuhan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan yang berlaku, kualitas hasil pembangunan belum sesuai dengan perencanaan.

### Analisis Matriks IFE (*Internal Faktor Evaluation Matrix*) dan Matriks EFE (*External Faktor Evaluation Matrix*)

#### Matriks IFE (*Internal Faktor Evaluation Matrix*)

Hasil analisis matriks IFE yang terdapat pada Tabel 3. Faktor yang menjadi kekuatan utama dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa adalah koordinasi dengan bawahan dan BPD sudah baik. Sedangkan kelemahan utama yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sekura dan desa Teluk Kembang adalah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Tabel 3. Matriks IFE Pengelolaan Keuangan desa Sekura dan desa Teluk Kembang

	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>				
A	Tingkat Pendidikan perangkat desa sudah tinggi	0,067	3,400	0,227
B	regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik	0,075	3,400	0,255
C	koordinasi dengan bawahan dan BPD sudah baik	0,081	3,200	0,258
<b>Kelemahan</b>				
D	kinerja perangkat desa belum maksimal	0,131	1,800	0,235
E	kapabilitas perangkat masih tergolong rendah	0,131	1,600	0,209
F	pengetahuan aparatur desa tentang administrasi yang masih rendah	0,129	1,200	0,155
G	masih berfokus pada pembangunan infrastruktur	0,129	2,000	0,258
H	belum bisa memanfaatkan SDA yang ada di desa	0,129	2,000	0,258
I	sistem pengendalian internal masih lemah	0,129	1,000	0,129
<b>Jumlah</b>		<b>1,000</b>		<b>1,984</b>

#### Matriks EFE (*External Faktor Evaluation Matrix*)

Hasil analisis matriks EFE terdapat pada Tabel 4. Faktor peluang utama yang dimiliki adalah besarnya ADD yang didapatkan. Kemudian diikuti oleh regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa sudah baik. Sedangkan faktor yang menjadi ancaman/tantangan utama bagi desa dalam mengelola keuangan adalah masih ada usulan yang terdani bersifat keinginan bukan kebutuhan.

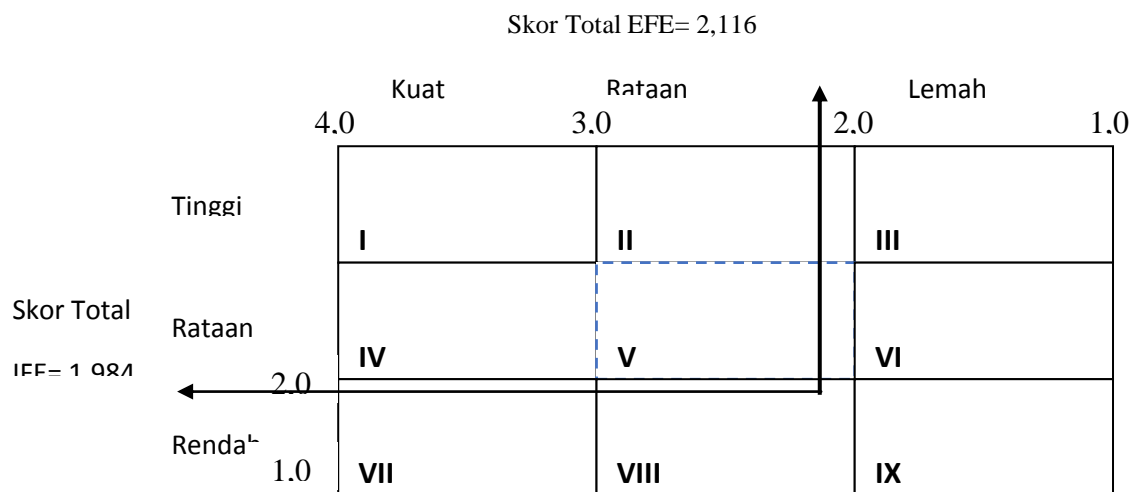
Tabel 4. Matriks EFE Pengelolaan Keuangan desa Sekura dan desa Teluk Kembang

	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang</b>				
A	besarnya ADD yang didapatkan	0,078	3,600	0,280
B	kemajuan teknologi informasi	0,071	3,400	0,242

	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
C	pengawasan yang dilakukan oleh BPD semakin baik	0,071	3,000	0,213
D	regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa sudah baik	0,074	3,600	0,268
<b>Ancaman/Tantangan</b>				
E	kurangnya transparansi	0,117	1,200	0,140
F	kondisi politik yang tidak menentu	0,078	2,000	0,156
G	kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat	0,128	1,200	0,153
H	masih ada usulan yang terdani bersifat keinginan bukan kebutuhan	0,128	2,000	0,256
I	rendahnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan yang berlaku	0,128	1,600	0,204
J	kualitas hasil pembangunan belum sesuai dengan perencanaan	0,128	1,600	0,204
<b>Jumlah</b>		<b>1,000</b>		<b>2,116</b>

**Analisis Matriks Internal-Eksternal (Internal-External Matrix)**

Nilai IE (*Internal-Eksternal*) adalah merupakan nilai yang didapatkan dari penggabungan antara nilai IFE dan EFE. Berdasarkan hasil perhitungan dihasilkan bahwa nilai IFE pengelolaan keuangan desa di desa Sekura dan desa Teluk Kembang adalah sebesar 1,984. Sedangkan nilai EFE-nya sebesar 2,116 seperti yang terlihat pada Gambar 3. perpaduan dari kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa strategi terletak pada sel VIII, yaitu suatu strategi untuk memperkecil atau mengurangi semua kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan desa.



Gambar 3. Matriks I-E dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sekura dan Desa Teluk Kembang

**Analisis SWOT**

Berdasarkan hasil evaluasi matriks IFE dan EFE, disusunlah matriks SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 7. Alternatif strategi terapan yang muncul dari matriks SWOT terdiri dari 5 jenis alternatif strategi, yaitu:

- Penguatan regulasi tentang pengelolaan dan tata pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.**

Strategi penguatan regulasi dalam pengelolaan dan tata pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan alternatif strategi *strengths-opportunities* (S-O). Regulasi khusus tentang desa sampai saat ini yang disiapkan oleh pemerintah tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan



kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti dengan baik. Seperti Perbup tentang perencanaan desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, perbup tentang teknis penggunaan dana desa. Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, peraturan perundang-undangan atau regulasi-regulasi seperti ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya.

**2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.**

Selama ini, perencanaan dan RAB serta dokumen lainnya disusun belum maksimal. Karena sering mengabaikan tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu kualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat penting untuk dilakukan.

**3. Meningkatkan koordinasi untuk memberikan pemahaman tentang perundang-undangan dan transparansi.**

Pengelolaan keuangan desa bukan suatu masalah yang menakutkan jika semua regulasi yang belum mengatur secara jelas tentang pengelolaan keuangan desa dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Sepanjang dapat dan bisa menyiapkan perangkat peraturan dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa dijamin akan tepat sasaran.

**4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk pengelolaan keuangan, pemanfaatan SDA dan pembuatan regulasi.**

Penguatan kapasitas dan kapabilitas kepada perangkat desa sangat penting untuk dilakukan khususnya untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan melalui reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, karena pemerintahan desa tidak bisa paham dan menjadi mampu dengan sendirinya tanpa ada intervensi positif dan pendampingan dari orang-orang yang ahli atau profesional dibidang pengelolaan keuangan.

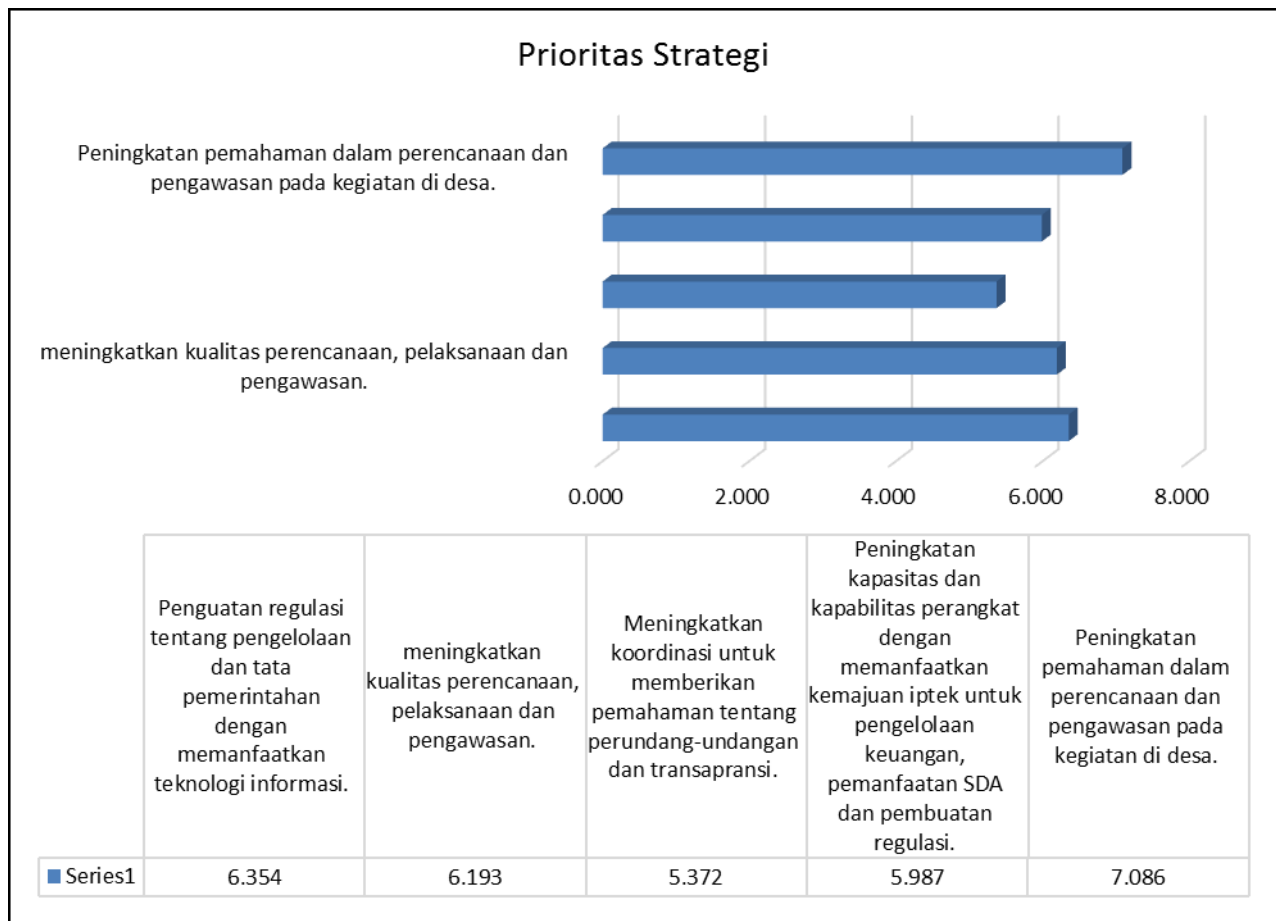
**5. Peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan di desa.**

Peningkatan pemahaman dan pengawasan pada semua aspek sangat penting untuk dilakukan. Mengingat selama ini pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular dan dari peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD. Satu sisi masyarakat tidak tahu harus berbuat apa, kepada siapa mengadu, dan seperti apa mekanisme pengaduan yang harus dilakukan. Sehingga banyak masyarakat hanya diam melihat kejadian yang terjadi.

**QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)**

Tahap akhir dari analisis SWOT adalah penentuan urutan alternatif strategi sebagai strategi prioritas yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) berdasarkan pengembangan David (2006). Faktor strategik internal dan eksternal diformulasikan dengan menentukan tingkat pengaruh setiap strategi yang ada dari hasil SWOT kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing faktor. Berdasarkan hasil perhitungan matriks QSP sebagaimana terlampir dalam Gambar 4, diperoleh urutan strategi penanganan risiko-risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Penilaian daya tarik strategis menunjukkan bahwa strategi paling menarik untuk diterapkan adalah strategi peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan di desa. Berdasarkan hasil QSPM maka urutan strategi prioritas yang selanjutnya adalah : penguatan regulasi tentang pengelolaan dan tata cara pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi; meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan dan

pengawasan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat dengan memanfaatkan kemajuan iptek; dan meningkatkan koordinasi untuk memberikan pemahaman tentang perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4. Urutan strategi prioritas berdasarkan QSPM

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan terhadap risiko pengelolaan keuangan desa dapat di ambil simpulan sebagai berikut :

1. Analisis IFE terdiri dari tingkat pendidikan perangkat desa sudah tinggi, regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik, koordinasi dengan bawahan dan BPD sudah baik, kinerja perangkat desa belum maksimal, kapabilitas perangkat masih tergolong rendah, pengetahuan aparatur desa tentang administrasi yang masih rendah, masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, belum bisa memanfaatkan SDA yang ada di desa, sistem pengendalian internal masih lemah. Analisis lingkungan eksternal besarnya ADD yang didapatkan, kemajuan teknologi informasi, pengawasan yang dilakukan oleh BPD semakin baik, regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa sudah baik, kurangnya transparansi, kondisi politik yang tidak menentu, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, masih ada usulan yang terdani bersifat keinginan bukan kebutuhan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan yang berlaku, kualitas hasil pembangunan belum sesuai dengan perencanaan.
2. Strategi pengembangan SWOT adalah Penguatan regulasi tentang pengelolaan dan tata pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi; Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; Meningkatkan koordinasi untuk memberikan pemahaman tentang perundang-undangan dan transparansi; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat dengan memanfaatkan kemajuan

iptek untuk pengelolaan keuangan, pemanfaatan SDA dan pembuatan regulasi; dan Peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan di desa.

3. Strategi pengembangan QSPM adalah peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan di desa; penguatan regulasi tentang pengelolaan dan tata cara pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi; meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan dan pengawasan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat dengan memanfaatkan kemajuan iptek; dan meningkatkan koordinasi untuk memberikan pemahaman tentang perundang-undangan yang berlaku.

#### **Saran**

Saran yang disampaikan adalah :Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut bertanggungjawab untuk menghadirkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami dalam keterbatasan SDM yang dimiliki oleh desa, dan perlunya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai risiko dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan aplikatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2011. Kabupaten Sambas dalam Angka Tahun 2011. BPS Kab. Sambas.
- David, F. R. 2004. *Strategic Management*. 6<sup>th</sup> Ed. New Jersey, USA: Prentice Hall Englewood Cliffs.
- David, F.R. 2006. Manajemen Strategi (Terjemahan). PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Hubeis, M. 2006. Pengantar Industri Kecil Menengah. Modul Kuliah, Program Magister Profesional Industri Kecil Menengah, Sekolah pascasarjan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hubeis, M. 2009. Prospek Usaha Kecil Menengah dalam Wadah Inkubator Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jauch, L.R dan W.F. Glueck. 1999. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Erlangga. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2010. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.